

TARIK-MENARIK ANTARA KEKUASAAN DAN ISLAM¹

Oleh Nurcholish Madjid

Islam menjadi sumber inspirasi moral dan etika berbangsa, yang *notabene* Indonesia sangat lembek sekali. Semakin maju negara, etika moral semakin *tough*, seperti Korea Selatan. Karena produktivitas terdorong dengan *high predictability*. Pikiran tersebut lahir dari cendekiawan Nurcholish Madjid dalam perbincangannya dengan wartawan Majalah *Forum Keadilan*, Wahyu Muryadi, Yusi A. Pareanom, dan Tony Hasyim. Ia juga menyorot perihal suksesi, bahwa presiden mendatang hanya *primus inter pares*, orang yang pertama dari yang sama. Untuk itu, pembenahan struktur harus diprioritaskan, terutama perihal kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk di antaranya kebebasan pers, sebagai kontrol sosial dari masyarakat. Berikut ini petikan wawancaranya.

Apa motivasi Anda masuk sebagai anggota KIPP itu?

Motivasi saya singkat saja; untuk menuju masyarakat yang lebih demokratis.

Memangnya, sekarang belum demokratis?

¹ Majalah *Forum Keadilan*, “Presiden Mendatang Tidak Akan Mampu Menjadi Pilot”, Nomor 26, Tahun IV, 8 April 1996. Pewawancara Wahyu Muryadi, Yusi A. Pareanom, dan Tony Hasyim.

Bukan begitu. Sekarang sudah banyak kemajuan, tapi kita masih bisa mengisi lebih baik.

Contoh kemajuannya apa?

Misalnya, kebebasan berpendapat sudah cukup maju. Kemarin saya menjadi pembicara di Sesko-ABRI. Saya lihat bukan main majunya ABRI mengembangkan kehidupan demokrasi. Para perwira ABRI bisa berbicara terbuka dengan sesamanya, walau itu tentang hal-hal konfidensial, yang tidak bisa didengar orang luar. Tapi paling tidak, kebebasan berbicara itu sudah ada di lingkungan mereka. Itu bagi saya merupakan suatu tolok ukur kemajuan kehidupan demokratis.

Kalau di luar ABRI *kan* belum?

Justru karena itu terjadi di ABRI, itu merupakan gejala menarik. Mengingat posisi ABRI sangat dominan di masyarakat, saya kira dalam waktu tidak lama lagi iklim tersebut akan menular ke masyarakat luas.

Dalam soal pers, mengapa pemerintah selalu reaktif

Saya kira, pers sekarang juga sudah cukup bebas menulis.

Tapi, *kan* ada pembredelan.

Jelas itu suatu kemunduran. Saya tidak bisa mengatakan lain, itu adalah suatu kemunduran. Tapi, dari sisi yang lain, saya lihat kehidupan demokrasi kita secara umum sudah ada kemajuan ketimbang lima tahun yang lalu atau sebelumnya. Tapi itu memang kembali lagi ke pribadi. Yang berbicara lantas masalah kepentingan. Yang lebih ringan mungkin masalah perbedaan wawasan atau kemampuan memahami wawasan. Jadi orang itu tidak punya akses

pada informasi yang lebih besar. Seperti Pak Harto itu *kan* mulainya begitu. Tapi, karena dengan tulus beliau bersedia dikelilingi orang banyak, akhirnya selamat. Apalagi karena pada dasarnya Pak Harto itu cerdas, ilmu yang diperolehnya luar biasa sekali. Itu sudah diakui oleh para ekonom. Mereka bilang, dulu mereka datang untuk menggurui Pak Harto, sekarang mereka datang untuk digurui.

Lalu, kenapa Anda masih masuk KIPP? Itu *kan* seolah-olah Anda tidak percaya pemerintah akan melaksanakan pemilu secara demokratis?

Bukan begitu. Kita bisa mengkondisikan agar kehidupan demokratis itu lebih baik. Saya akan mengisi itu dengan segala kemampuan saya, misalnya dengan menulis atau melalui ceramah. Jadi sebenarnya banyak pintu untuk masuk menuju itu. Salah satunya adalah melalui KIPP itu.

Siapa yang pertama kali melontarkan ide KIPP itu?

Sebenarnya, sudah dari dulu banyak yang ingin membentuk lembaga semacam itu, cuma tidak pernah kesampaian. *Nah*, kebetulan Goenawan Mohamad dan orang-orang sekitarnya beberapa waktu lalu, kembali melontarkan ide tersebut. Karena dirasakan sudah mendesak dan cukup banyak, orang yang ingin terlibat, jadilah. Lalu saya diajak ikut, ya saya ikut.

Kenapa tidak ikut salah satu orsospol saja, *kan* lebih efektif?

Saya rasa, lebih baik orang seperti saya aktif dalam gerakan moral. Dulu, saya memang pernah ditarik untuk menjadi anggota P, tapi saya sadari bahwa saya lebih baik bergerak di bidang moral. Karena itulah saya bersedia masuk KIPP. Karena KIPP tidak bertujuan menjadi kekuatan politik, melainkan sebagai kekuatan moral.

Sebagai tokoh Islam, kenapa Anda tidak mendukung PPP, yang sekarang sudah (kembali) menegaskan sebagai partai Islam?

Saya tidak setuju itu. Saya yakin, PPP bisa menjadi besar tanpa menjadi partai Islam. Yang penting, bagaimana PPP menjadi partai yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saya kira, kalau itu sudah sungguh-sungguh dilakukan, PPP akan menjadi besar dengan sendirinya.

Lalu, bagaimana dengan langkah-langkah Buya Ismail dengan PPP-nya yang cukup kontroversial belakangan ini?

Itu harus didukung. Bukan untuk kepentingan Buya *an sich*, tetapi untuk penciptaan iklim yang lebih seimbang. Kalau kita mendukung satu kelompok, itu karena ada satu sistem yang kita perjuangkan. Yang saya lakukan untuk pemilu tahun 1977 juga untuk sistem itu, bukan untuk PPP-nya. Karena sistem lebih awet. Negara kita arahkan ke situ. Sebab selama 50 tahun kemerdekaan, kondisinya seperti naik pesawat. Selama ini kita hanya punya dua pilot. Untungnya pilot itu punya iktikad baik, sekalipun di tengah jalan ada beberapa gangguan. Kalau pilotnya ngawur, bagaimana? Bisa kacau negara ini. Karena itu, untuk yang mendatang tidak bisa begitu lagi. Karena presiden mendatang pasti tidak akan mampu menjadi pilot.

Siapa bilang?

Semua orang. Presiden mendatang hanya *primus inter pares*, orang yang pertama dari yang sama. Kita harus belajar menerima orang seperti itu. Sebab kalau tidak, nasib kita bisa seperti Yugoslavia yang sangat mengerikan. Mungkin kita lebih baik prasarananya dari Yugoslavia dalam arti kita punya falsafah. Sekalipun dalam rangka penyucian Pancasila ada beberapa ekses, tetapi Pancasila sebagai *presumed truth* harus diterima. Sebab kalau tidak begitu, negara tidak akan berjalan. Jadi kita sudah dilengkapi perangkat

lunak falsafah itu dan dilengkapi bahasa. Bahasa nasional itu suatu sukses yang luar biasa. Jadi sekalipun kita punya modal dasar, *toh* kesiapan perlu dijaga: struktur.

Apa tujuan pembenahan struktur itu?

Yang paling penting, ya kebebasan. Kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk di antaranya kebebasan pers, sebagai kontrol sosial dan masyarakat. Jadi, persoalan tidak semata-mata tergantung pribadi pemimpin, melainkan pada dinamika masyarakat. *Check and balance* berfungsi. Ambil contoh korupsi. Itu bukan masalah pribadi, tetapi lebih pada masalah pengawasan. Misalnya, Indonesia disinyalir sebagai salah satu negara yang paling korup. Gambarnya *kan* seolah-olah, semua orang Indonesia itu korup dan jahat.

Sekarang bagaimana dengan maraknya ormas baru itu?

Saya tidak tahu, karena saya bukan mereka. Tapi kesan yang saya tangkap, adanya kesungguhan pemerintah untuk mengembangkan iklim keterbukaan. Lima tahun lalu, tidak ada orang yang akan berpikir untuk mendirikan Masyumi Baru ataupun PNI Baru, karena pasti akan langsung ditangkap. Sekalipun tidak setuju dengan organisasi baru itu, saya menganggap itu sebagai indikasi positif dari dinamika masyarakat. Masalah mereka tidak puas dengan ICMI, itu *kan* upaya merasionalisasi keadaan.

Gejala itu disebut apa?

Ya, macam-macam. Ada yang menyebut politik aliran. Politik aliran itu akan selalu ada. Di Amerika saja masih ada. Partai Demokrat dan Republik masing-masing punya kantong pendukung. Orang Katolik, Yahudi, kulit hitam, kaum minoritas lainnya, serta kulit putih di pantai timur Amerika, cenderung Demokrat. Sedangkan yang Protestan, dan yang berada di daerah selatan serta

barat, cenderung Republik. Kemudian di Inggris dan Jerman juga ada. Jadi, untuk mengharamkan politik aliran, itu *nonsense*. Jadi, yang diharapkan, ya jangan sampai merusak.

Apakah sekarang agama sudah berada di posisi yang selayaknya?

Saya kira ya, sekalipun belum sempurna. Seperti kata Pangab Feisal Tanjung, memang seharusnya agama ditempatkan sebagai sumber inspirasi moral dan etika. Jadi bukan seperti idiom tempo dulu yang menginginkan negara Islam. Sama seperti agama Kristen di Amerika. Orang Amerika tidak bisa menerima calon presiden yang bercerai, berselingkuh seperti Gary Hart. Sebab itu, sulit sekali jadi pemimpin. Sehingga orang keliru kalau menganggap Amerika sebagai negara sekular yang tidak mengindahkan agama. Etika moral Kristen sangat terpegang kuat. Di negara kita, yang Muslimnya terbesar di dunia, korupsi terjadi luar biasa. Ha-ha-ha.... itu menunjukkan etika Islam belum menjadi sikap keseharian. Masalahnya, umat Islam masih terpaku pada simbol, yaitu harus mendirikan masjid, naik haji, dan simbol yang lain.

Kekhawatiran penguasa terhadap Islam berkurang. Apa bahayanya?

Itu masalah tafsiran. Menegaskan diri sebagai umat Islam itu *kan* sebagai kemampuan diri. Tetapi sayangnya, dalam retorika khutbah, yang muncul adalah ajakan agresivitas. Sikap agresi itu justru indikasi orang yang tidak percaya diri. Kalau orang punya *confidence*, pasti tidak akan begitu, ia akan toleran. Jadi, sayang bila khatib berseru: “*isyhadû bi-annâ min al-muslimîn*” tetapi belum tuntas identitasnya, karena yang muncul sikap agresif. Ia selalu melihat orang lain akan mengancamnya.

Lalu, bagaimana agar kita semua merasa aman?

Kelompok non-Islam itu harus diingatkan, bahwa umat Islam itu 90 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Jadi, banyak sekali. Sehingga konyol sekali jika mengharap semua bersikap sama. Misalnya, kita tidak bisa membuat *collective judgement* terhadap umat Kristen hanya karena HKBP, yang memperebutkan gereja, sampai bunuh-bunuhan. Itu *kan* tidak boleh. Demikian juga untuk Islam. Dalam sejarah ada contoh tahun 1950-an. Saat itu kepercayaan diri Masyumi sangat besar, sehingga yang digandeng bukan dari NU tetapi malah PSI, Parkindo, dan Katolik, untuk bergabung di Liga Demokrasi, yang lantas ditandingi dengan Liga Muslimin. Karena itu saya selalu bilang, orang seperti Gus Dur perlu didukung. Ia sangat berjasa dalam proses perataan jalan agar orang menjadi punya *confidence* pada dirinya. Kalau saya bilang pada Romo Mangun, tampilnya Gus Dur itu bagai mukjizat.

Gus Dur mengkhawatirkan semakin menguatnya fundamentalisme dan semakin solidnya kelompok ICMI garis keras.

Maka, saya selalu berpendapat, kritik terhadap ICMI itu sangat diperlukan. Karena itu kami selalu berterima kasih terhadap Gus Dur, sekalipun ada kritiknya yang bisa dibantah, seperti masalah sektarian. Tetapi sebagai *warning*, itu bagus, meskipun secara sadar ICMI dirancang untuk tidak menjadi sektarianis. Secara intern juga tidak ada aliran apa yang harus diperjuangkan. Hanya, karena sudah terlanjur dikhawatiri, dicurigai, mekanisme pertahanan psikologisnya jadi agresif. Sebetulnya, tidak perlu takut terhadap ICMI. Apalagi bila figur yang dilihat adalah Habibie dan Wardiman. Liberal betul dia. Wardiman itu berkali-kali bilang pada saya, untung kita ini ada Gus Dur, sekalipun ia tidak bisa terbuka. Keberatan terhadap Habibie sebenarnya pada politik industrinya. Ketidacocokannya dengan beberapa kalangan *kan* soal itu.

Tapi di ICMI, NU kalah peran dibanding Muhammadiyah

Sebenarnya dari dulu kelompok Habibie berusaha untuk menarik NU agar masuk, dengan membujuk Gus Dur untuk ikut. Tapi Gus Dur menolak dengan segala alasannya. Meskipun demikian, Muhamad Thaher masuk karena usul Gus Dur sendiri. Menurut saya, NU tak perlu gusar, karena apa yang dilakukan ICMI adalah suatu tahap yang juga merupakan tahap yang dijalani bangsa Indonesia. Sekarang ini baru tahap munculnya intelektual dengan latar belakang keagamaan yang disebut “kaum modernis”. Seperti langkah modernisasi NU yang dilakukan Wahid Hasjim, yang hasilnya baru bisa terlihat 20 tahun sesudahnya. Maka, sama juga dengan ICMI, pencapaian sesungguhnya baru bisa terlihat 20 tahun lagi.

Sebetulnya, apa dan bagaimana idealisme ICMI?

Yang *pertama*, tidak ada pikiran untuk mendirikan negara Islam. *Kedua*, tidak ada semacam *catering* terhadap kelompok fundamentalis. Habibie tidak percaya itu, juga Adi Sasono. Jadi ICMI itu suatu organisasi yang Indonesia betul, hanya labelnya Islam. Namun artikulasinya belum sempurna, sehingga yang muncul semacam itu. Tapi *mainstream kan* tidak. Tadi malam saya buktikan. *Khiththah* yang dipercayakan penulisannya pada saya, terbukti disetujui secara aklamasi.

Kok, perlu bikin *khiththah* segala, seperti NDP HMI?

Mungkin yang lain-lain juga punya *khiththah*, ICMI juga ingin punya. Memang lucu, tadi malam, *kok* seperti NDP (Nilai Dasar Perjuangan). Begitu ICMI terbentuk, sebetulnya keinginan untuk itu sudah ada. Hanya belum sempat terbentuk karena dirembuk ramai-ramai. Padahal dari dulu *khiththah* selalu ditulis satu orang. Saat terbentuk dulu, proses perataan jalan ICMI, sehingga tarik ulurnya luar biasa. Saya biarkan saja. Semua mencoba membuat *khiththah* tetapi macet. Akhirnya diserahkan pada saya dengan *blank check*.

Apa pun yang saya tulis akan diterima, akhirnya ya diterima betul, ha-ha-ha.... Meskipun saya gunakan bahan-bahan yang lama juga.

Dengan terpilihnya lagi Habibie, itu mempertegas bahwa ICMI memang bergantung kepada kekuasaan?

Itu memang dilematis sekali. Di satu sisi, ada resistensi yang luar biasa terhadap ICMI. Sebagai satu simbol pergerakan umat Islam, yang bergerak ke atas, ICMI merisaukan satu golongan di atas yang sudah lama menikmati posisinya. Dengan sendirinya terjadi gesekan. Ada yang lancar, ada pula yang sebaliknya. Karena yang di atas memiliki *upper hand*, tangan yang lebih dominan, dalam *showdown* seperti itu memiliki potensi untuk menang yang lebih besar. Karena itu orang ICMI merasa harus ada yang mewakili golongan atas itu. Tapi harganya yang dibayar ya itu, yang sekarang menjadi bahan kritik banyak orang, menyatu dengan birokrasi ini. Amien Rais, yang dulu oposan, sekarang juga masuk, karena sering seseorang tidak menyadari persoalan sebelum terlibat di dalam.

Tapi di lain pihak, kalau terus-menerus begini, ICMI akan kehilangan legitimasinya, karena ICMI mengklaim diri sebagai gerakan intelektual. Kalau saat ini, boleh dikatakan karena suasana daruratlah. Untuk itu, tidak permanen betul, sebab yang permanen yang independen betul, yang tidak tergantung. Sebetulnya ini masih merupakan kelanjutan dari kultur politik Indonesia. Mengenai beberapa orang NU yang risau karena sampai sekarang masih belum diterima Presiden? Tumbuhkanlah mental bahwa kita tidak perlu diterima Presiden. Jangan seolah-olah kurang *afdlal* ataupun kurang sah bila tidak diterima Presiden. Jadi satu organisasi yang disebut *civil society* dalam bahasa kasarnya harus cukup angkuh, atau halusnyanya punya *dignity*. Jadi ICMI juga harus begitu.

Apa bisa ICMI melepaskan diri dari ketergantungan itu?

Harus bisa.

Tapi banyaknya ICMI di birokrasi, itu yang menyulitkan?

Ya, memang itu ongkosnya tadi, karena memang tidak bisa gratis. Pengorbanan itu harus diperhitungkan secara rasional *cost benefit*-nya. Jangan membayar terlalu banyak ongkos, tetapi bagaimana *benefit* itu teraih. Kompromi itu tak terelakkan dalam budaya politik kita. Tentang itu, di ICMI ada yang bagus juga dengan pembagian kerja, sehingga tidak semua tenaga tersita untuk itu. Jadi ada *outside-insider* dan *inside-outsider* yang berfungsi menjaga gawang.

Karena banyak birokrat, ICMI dituduh sebagai kendaraan politik.

Itu sekadar ekses dan nilainya sekunder, sekalipun mungkin secara jumlah banyak. Tapi tetap disebut ekses. Bisa juga dibalik sebagai sinyalemen alat politik yang dipakai oleh atas, untuk mengatur yang bawah. Jadi semacam tumbu oleh tutup. Klop, karena masing-masing sama-sama berkepentingan. Jadi, sinyalemen tadi ekses. Tapi setiap anggota punya potensi laten cendekiawan, yang nantinya pasti akan bertanya, "*Lho, kita ini intelektual, kok begini?*" Kira-kira dalam bahasa yang sederhana *kan* begitu. Sekarang saja sudah mulai muncul, sekalipun tidak spektakuler, karena semua orang menyadari dilema itu. Itu salahnya orang Kristen tentang ICMI. Dulu bila sambutannya tidak semacam itu mungkin lain ceritanya. Karena begitu lahir sudah dipojokkan dengan kecurigaan, ya sudah sekalian saja begini. Mekanisme pertahanan diri *kan* begitu.

Tapi, kenapa ICMI tak pernah menyentuh masalah kerakyatan seperti kasus perburuhan atau demokratisasi?

Sebetulnya kalau kita lihat tema-tema yang ada di *Republika* sudah mengarah ke sana, bahkan dianggap cukup berani. Tetapi memang tidak sampai menggunakan jargon-jargon demokratisasi

seperti yang diungkapkan LSM independen, karena ada dilema-dilema tadi. *Republika kan* menghadapi dilema: ke atas seperti yang sudah kita tahu, ke bawah ia dianggap terlalu liberal, bahkan pernah didemo pembacanya. Karena itu ia harus pandai meniti buih, agar perahu tak terbalik, karena jalurnya sempit sekali. Tetapi memang di ICMI ada orang-orang yang berharap banyak untuk meluncur ke atas, bahkan untuk tingkat yang lebih bawah pun semua punya *vested interested*.

Apakah tuntutan itu terlalu berlebihan?

Begini. Kalau LSM yang kecil mereka itu *kan nothing to lose*. Sedangkan ICMI besar sekali taruhannya. Jadi, karena itu harus diletakkan dalam kerangka kalkulasi yang rasional sekali.

Hanya cari aman?

Ya, tidak salah kesan itu. Tapi sekarang ICMI perlu *the secure area for freedom of action*, wilayah yang aman untuk bergerak. Sebab kalau tidak aman, tidak akan dapat berbuat apa-apa.

Jadi, ICMI pro *status quo*?

Kalau langsung pro *status quo* sih, tidak. Itu ekses dari dilema. Kalau sekarang ICMI langsung menyuarakan tuntutan demokratisasi sebagaimana lazimnya organisasi intelektual yang bersifat mengimbangi pemerintah, saat itu juga ICMI akan kehilangan banyak hal, dan tidak dapat berbuat banyak. Jadi bisa habis-habisan betul.

Apa dulu arahnya memang begitu?

Tidak, kami dulu merangkul Habibie untuk proteksi politis. Tetapi sekarang jadi semacam *political positioning*.

Itu tidak memperburuk situasi berbangsa?

Ya, bisa. Lagi-lagi Pak Harto saya lihat *outsmart*, karena beliau telah memperingatkan untuk tidak menggunakan agama sebagai kepentingan politis. Itu juga terucap dari Jenderal Feisal Tanjung.

Kini banyak jenderal santri di ABRI. Apa artinya buat umat Islam?

Kalau dari perspektif saya, Islam itu menjadi *national concern*. Tidak dalam arti untuk kepentingan orang Islam sendiri seperti dulu. Tetapi Islam menjadi sumber inspirasi moral dan etika berbangsa, yang *notabene* Indonesia sangat lembek sekali. Semakin maju negara, etika moral semakin *tough*, seperti Korea Selatan itu. Satu saat kita harus begitu kalau mau maju. Karena produktivitas terdorong dengan *high predictability*. Artinya, ada kepastian bahwa bila saya melakukan begini, yang saya terima akan begini. Sekarang tidak tentu, sehingga motivasi orang bekerja jadi lembek. Sebab yang dominan relasi, taruhannya bukan etika moral. Itu pentingnya Islam menjadi *national concern* tadi, tanpa mengesampingkan agama lain. Sebab bila masalahnya etika dan moral, itu merupakan titik-temu dari agama-agama.

Itu berkaitan dengan pidato Anda di TIM, tentang *al-hanîfiyah al-samḥah*?

Persis. *Hanîfiyah* itu kecenderungan untuk mendapatkan kebenaran tanpa embel-embel, tanpa komunalisme, tanpa saya ini Muslim, saya ini Yahudi, atau Kristen. Sedangkan perkataan Islam itu sendiri *kan* dikaitkan dengan pemihakan kebenaran tanpa label. Jadi artinya universal, sehingga umat Islam ini harus mengembangkan lebih jauh bagaimana implikasi keimanannya terhadap semua nabi dan kitab suci.

Tapi, akhir-akhir ini muncul kerusuhan dengan implikasi SARA. Orang gampang mengamuk dan membakar.

Itu karena kekhawatiran seperti yang saya bilang tadi. Orang-orang Katolik di Timor Timur merasa tidak aman. Selain faktor agama, faktor kesukuan juga memegang peranan penting. Orang Islam relatif lebih terbebas dari faktor kesukuan itu. Misalnya HKBP, itu *kan* kesukuan yang muncul. Orang Islam, sekeras-kerasnya dia, tidak akan bunuh-bunuhan untuk berebut masjid. Jadi, bila orang Kristen saling bunuh-bunuhan untuk gereja, itu hanya bisa diterangkan dengan faktor suku, bukan faktor agamanya. Karena sekte-sekte itu mengikuti suku, sehingga liturginya sendiri-sendiri.

Kalau kerusuhan di Timor Timur?

Itu sebenarnya lebih merupakan efek keterkejutan dari pendidikan yang mereka terima. “Akibat tak sengaja” dari pendidikan lebih penting dari “akibat sengaja”-nya. Misalnya, satu orang dididik menjadi insinyur, tetapi akibat tak sengaja ia jadi terpelajar. Lalu muncul kesadaran baru, termasuk politik. Jadi faktor agama hanya bumbu. Sebenarnya bila mau menerapkan cara Machiavelis, dulu, begitu integrasi, orang-orang Timtim itu dibiarkan bodoh saja. Tapi itu tidak mungkin, karena kita berpancasila. Akhirnya kita didik, setelah pintar, mereka jadi tukang protes ha-ha-ha.... Hal yang sama terjadi ketika Belanda mendidik bumiputra, yang akhirnya melahirkan tokoh Soekarno, Hatta, dan tokoh yang lain.

Pemerintah telah memberi penghargaan bagi tokoh Masyumi. Itu rehabilitasi atau apa?

Secara obyektif, Prawoto dan kawan-kawannya itu sangat berjasa. Namun hal itu juga menunjukkan hilangnya trauma terhadap umat Islam. Pak Natsir belum bisa, karena dulu pernah berontak. Meski demikian, orang Masyumi optimistis. Hanya masalah waktu.

Sebenarnya, apakah itu fenomena umat Islam yang memanfaatkan momentum, atau Pak Harto ingin memainkan kartu Islam, atau simbiose mutualistis?

Saya kira begitu. Tapi kalau kita percaya pada tesis Harry J. Benda tentang siapa yang akan menggunakan siapa, pada akhirnya Islam yang akan menggunakan lawannya. Tapi Islam di sini bukan orang tetapi ide keislaman itu sendiri. Jadi orang semakin Islam sekalipun bukan orang Islam. Artinya ia semakin *committed* pada Islam. Misalnya Muhammadiyah, dulu Snouck Hurgronje memberi advis pada pemerintah kolonial agar Islam politik ditekan dan Islam budaya saja yang dikembangkan, maka Muhammadiyah masuk, *jlek*, begitu. Apa yang terjadi?

Benda menggambarkan seolah-olah api Muhammadiyah itu membakar ilalang yang sudah kering. Akibatnya, keinginan Hurgronje jadi pupus. Padahal, dulu Muhammadiyah itu musuhnya bukan NU. Kalau dengan NU, sekadar masalah khilafiyah. Tapi yang lebih gawat dengan orang Sarekat Islam, karena Muhammadiyah menerima subsidi dari Belanda, sementara sekolah-sekolahnya sendiri juga dinamai dengan nama Belanda, seperti HIS, MULO. Sehingga ada semacam konsepsi bahwa itu mendukung kolonialisme. Tapi yang terjadi tidak begitu. ICMI bisa begitu, asal dirinya sendiri kuat. Tapi kalau lemah, dengan sendirinya, ya terkurung. Salah satu kekuatannya, peningkatan wawasan tadi. Itu sebenarnya pentingnya *khiththah* itu, untuk mengetahui siapa, *sih*, kita ini. Bila sudah ada, ini menjadi *mood of life*-nya ICMI. Saya hidup karena ini. Seperti kata Descartes, *cogito ergo sum*, saya ada karena berpikir. *Nah*, saya ada karena saya punya wawasan. Sehingga ibarat ikan yang hidup di laut, yang harus kerendam di air asin, tetapi tidak menjadi asin. Ia tetap menjadi dirinya sendiri. [❖]